

Menggagas Pendidikan Multikultural Melalui Wacana Konflik Antaretnis : Sebuah Model *Case Based Learning*

I Nyoman Suaka,
Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
IKIP Saraswati Tabanan
Email, suakanyoman@gmail.com

Abstrak

Tujuan artikel ini untuk menggagas model pendidikan dengan menekankan keberagaman yakni pendidikan multikultur. Model pendidikan ini penting dibahas karena Indonesia adalah negara pluralis yang terdiri dari berbagai etnis, agama, budaya, bahasa daerah yang berbeda-beda. Kondisi beragam tersebut kalau tidak dikelola dengan baik, maka dikhawatirkan akan muncul disintegrasi bangsa. Banyak terjadi kasus antaretnis pernah terjadi di Indonesia seperti kasus Lampung, Sampit, Poso, Maluku dan Papua. Konflik lokal yang diduga sebagai persaingan antaretnis dapat dikaji sebagai sebuah kasus untuk menggagas pendidikan multikultural. Model Pendidikan multikultural yang ditawarkan adalah pembelajaran menghargai perbedaan, toleransi, silang budaya (*cross cultural*) dan kesetaraan. Dalam praktek di kelas, siswa diajak untuk memahami kebhinekaan, merayakan perbedaan, toleransi lintas agama, lintas budaya dan kearifan lokal. Pendidikan multikultural ini sifatnya terintegrasi, sebagaimana halnya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam kurikulum merdeka. Konflik antaretnis sebagai sebuah wacana dapat dijadikan materi ajar bahasa Indonesia, berkolaborasi dengan bidang studi lain yang serumpun. Secara ideologi, Indonesia sudah memiliki pemahaman multikultural yang cukup kuat melalui, slogan Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun praktek di lingkungan pendidikan, belum terealisasi secara nyata. Gagasan pendidikan multikultural melalui pembelajaran berbasis kasus (*case based learning*) perlu dibahas di dalam kelas sehingga pembelajaran akan lebih kontekstual dan bermakna.

Kata Kunci : Multikultur, wacana, kasus, pembelajaran

1. Pendahuluan

Istilah multikultural mulai mendominasi wacana publik di Indonesia awal tahun 2000-an sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berlarut-larut, meletusnya konflik kekerasan antaretnis dan gerakan separatisme di Indonesia. Sebelum istilah multikulturalisme populer dalam wacana publik dan akademik, istilah yang banyak dipakai adalah pluralisme (Putra, 2008:120). Dalam konteks kebudayaan, multikulturalisme bisa berarti, “berlakunya lebih dari satu identitas budaya dalam sebuah tatanan masyarakat (Hardjana, 2003:2).

Pemberlakuan Undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah telah membuka jalan bagi daerah-daerah untuk mengatur dirinya sendiri, khususnya dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang selama ini diatur oleh pemerintah pusat. Selain itu, semangat otonomi daerah telah memperkuat emosi kedaerahan, kesukuan, dan etnisitas. Akan

tetapi, menurut Piliang (2003), otonomi daerah tidak pernah dilihat dalam kerangka perubahan kultural yang lebih luas dan holistik, yang didalamnya berbagai keuntungan bisa diperoleh. Bila cakrawala dalam melihat otonomi itu diperluas, maka otonomi sesungguhnya dapat dipikirkan sebagai jaringan (*web*), yang di dalamnya dapat dibangun garis-garis hubungan antarbudaya (*trans cultural*) yang sangat kaya. Dalam jaringan kultural tersebut, setidaknya terdapat tiga kreasi kultural yang dapat dibangun yakni antara daerah (lokal-lokal), anatara daerah dan pusat (*local-center*), antara daerah dan unsur-unsur global (lokal-global).

Kondisi Indonesia yang beragam atau multikultural merupakan kekayaan bangsa. Namun di sisi lain dianggap sebagai sumber konflik. Kelompok yang menganggap keanekaragaman itu sebagai kekayaan bangsa, menurut Sabarani (2003), hampir tidak pernah merumuskannya secara terperinci dan jelas. Hal itu, mungkin dikondisikan oleh kebijakan pemerintah di era Orde Baru yang pada saat itu bersifat sentralistik. Kebijakan tersebut mengarah keseragaman dan akhirnya cenderung menganggap keanekaragaman sebagai sumber konflik. Jika keanekaragaman itu tidak diterima, dihormati, diantisipasi, disikapi dan diatasi dengan sungguh-sungguh, hal itu menjadi sumber konflik yang sewaktu-waktu muncul ke permukaan.

Terkait dengan hal di atas dan mengagas pendidikan multikultural, konflik antar etnis dapat dijadikan renungan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Keberagaman merupakan kenyataan di Indonesia yang harus dikelola secara kreatif inovatif. Salah satu caranya, menanamkan nilai-nilai positif, mengedepankan persamaan dan mengelolanya melalui pembelajaran, yakni dengan pendidikan berwawasan multikultural. Pendidikan multikultural yang belum memiliki formula itu dapat menggunakan wacana konflik antaretnis sebagai sumber belajar. Hal ini sangat relevan dengan pembelajaran berbasis kasus (*Case Based Learning*) dan pembelajaran berbasis masalah (*Problem Based Learning*).

Kedua model ini, terutama *Cased Based Learning* (CBL) layak dikembangkan, karena pembelajaran ini diangkat dari kasus dan fakta-fakta yang menjadi isu nasional. Dengan basis multikultural, anak didik perlu diajak untuk mempelajari nilai budaya lain, melalui silang budaya (*cross culture*), dan rasa saling menghormati. Pada akhirnya mereka dapat menghargai dan memiliki toleransi dengan budaya lain. Modelnya, bukan dengan menyembunyikan budaya lain, atau menyeragamkan berbagai budaya menjadi satu, budaya nasional, sehingga budaya lokal terpinggirkan. Dalam pendidikan berbasis multikultural, tiap budaya diakui mempunyai nilai sendiri, sebagai pengetahuan lokal atau learifan lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka masalah dalam artikel ini adalah bagaimana wacana konflik antaretnis di Indonesia dikaitkan dengan keberagaman. Bagaimana wacana

konflik tersebut dapat dijadikan pembelajaran berbasis kasus (*Case Based Learning*) Model *Case Based Learning* (CBL) adalah model pembelajaran dengan pemberian sebuah kasus yang menggambarkan detail dari situasi dunia nyata yang kompleks. Peserta didik belajar menyelesaikan masalah tersebut dengan beberapa alternatif solusi, baik secara individu maupun kolaboratif. Peserta Didik didorong untuk mempertahankan solusi yang mereka yakini paling tepat (Astawa, dan Tegeh, 2025). Perbedaannya dengan Problem Based Learning Model (PBL) bahwa PBL tidak membutuhkan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya terkait materi/kasus tersebut, sedangkan CBL membutuhkan pengetahuan sebelumnya yang dapat mendukung penyelesaian kasus berikutnya

Menurut Suharta (2026), kasus adalah sebuah keadaan sebagai representasi dari pengetahuan dan pengalaman yang disajikan dalam bentuk deskripsi situasi (pembelajaran) nyata. Kasus adalah situasi otentik yang secara kontekstual kaya dan sangat berkesan bagi siswa dan mahasiswa. Jadi Kasus merupakan permasalahan yang disajikan dalam bentuk deskripsi atau cerita yang relatif panjang. Muatan kasus dipaparkan agar terbentuk beragam pemikiran dan analisis hasil diskusi antar mahasiswa. Bagian utama dari kasus membahas rumor dan informasi nyata. Kasus umumnya tidak memberikan pertanyaan, karena pemahaman atas apa yang seharusnya ditanya merupakan bagian penting dari analisis kasus

Tujuan Pembelajaran CBL menurut Suharta (2026), Astawa dan Tegeh (2025) yakni

1. Melatih peserta didik belajar secara kontekstual.
2. Mengintegrasikan prioritas knowledge dengan permasalahan yang terdapat di dalam sebuah kasus sebagai upaya belajar untuk mengambil keputusan secara professional.
3. Mengenalkan tatacara pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang tepat atau rasional (evidence-based)

Berkenaan dengan itu, peserta didik perlu terlebih dahulu diberi materi yang sesuai dan cukup agar pembahasan kasus dapat berjalan lancar dan peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa kasus antar etnis yang dijadikan bahan pembelajaran adalah Kasus Sampit-Sambas, Kasus Lampung, Kasus Maluku dan Papua. Konflik antaretnis ini mencuat menjadi pemberitaan nasional di media massa baik cetak maupun elektronika. Untuk membantu peserta didik, maka empat kasus tersebut akan dijadikan bahan pembelajaran. Kasusnya berupa wacana teks yang dikutip dari berbagai sumber seperti surat kabar, internet, televisi dan media online.

CBL memiliki beberapa manfaat yakni 1). Sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman melalui *learning by doing* 2). Mengembangkan kemampuan analitik (berpikir kritis) dan memutuskan sesuatu (Decision making-skill) 3). Belajar bagaimana mengkaitkan yang dipelajari dengan masalah 4). Mengembangkan komunikasi secara verbal dan bekerja sama dalam kelompok 5). Kerja dalam kelompok meningkatkan rasa percaya diri peserta didik mulai dari kelompok kecil (peer group), menjadikan tingkah laku yang positif, lebih mengerti proses bagaimana memecahkan masalah dan keterbatsannya serta kemampuan mempertanyakan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan kritis selama proses diskusi.

Untuk mengantarkan pembelajaran multikultural berbasis kasus dilakukan melalui bahan ajar wacana konflik antaretnis. Konflik dimaksud beririsan dengan pembelajaran berbasis masalah (PBL) karena konflik itu bagian dari masalah. Dalam CBL, kasus yang bisa dijadikan bahan ajar, tidak saja kasus dalam dunia nyata, tetapi juga kasus yang bersifat rekaan yang sengaja dibuat (Bustoni, 2025). Kasus rekaan sering dijumpai dalam karya sastra seperti novel, cerita pendek dan drama. Namun pada pembahasan ini difokuskan pada kasus nyata di tengah-tengah masyarakat.

2. Pembahasan

2.1 Wacana Konflik Sampit, Lampung, Ambon, Papua

Konflik Sampit atau disebut konflik Sambas, di Kalimantan terjadi minggu ke-3 dan 4 Februari 2001. Konflik ini adalah kekerasan antaretnis yang bermula di Sampit, Kalimantan Tengah, dan menyebar ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangka Raya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan suku Madura, penduduk migran dari pulau Madura di lepas pantai Jawa. Asal mula konflik ini masih diperdebatkan, namun akibat konflik tersebut, ratusan korban tewas (Wikipedia, diakses 20 April 2026).

Konflik Sampit bukanlah insiden yang terisolasi karena telah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Penduduk Madura pertama kali tiba di Kalimantan pada era 1930-an di bawah program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 2000, transmigran mencapai 21% dari populasi penduduk Kalimantan Tengah. Suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin

agresif. Peraturan baru yang diberlakukan memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi ini seperti perkayuan, pertambangan dan perkebunan.

Beberapa rumor yang menjelaskan insiden kerusuhan tahun 2001. Satu versi mengklaim bahwa, konflik ini disebabkan oleh serangan pembakaran sebuah rumah warga Dayak. Rumor mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh warga Madura dan kemudian sekelompok anggota suku Dayak mulai membakar rumah-rumah di permukiman Madura. Tokoh masyarakat, K.M.A. Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak mengklaim bahwa kekerasan oleh suku Dayak dilakukan demi mempertahankan diri setelah beberapa anggota mereka diserang. Selain itu, juga dikatakan bahwa seorang warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura setelah sengketa judi di desa Kerengpangi pada 17 Desember 2000. Versi lain mengklaim bahwa konflik ini berawal dari percekocokan antara murid dari berbagai ras di sekolah yang sama.

Konflik lain terjadi antara suku Lampung (Desa Agom) dan Bali (Desa Balinuraga) di Lampung Selatan pada Oktober 2012. Peristiwa ini adalah kerusuhan etnis yang dipicu kesalahpahaman antara pemuda, berujung pada bentrokan fisik, kerusakan bangunan, dan korban jiwa. Konflik ini berakar dari ketegangan sosial-ekonomi jangka panjang, eksklusivitas permukiman, dan perbedaan budaya. Pemicu utama kerusuhan diduga oleh insiden kecil, yaitu senggolan sepeda motor yang berujung tuduhan pelecehan seksual oleh warga Desa Agom terhadap warga Bali di Desa Balinuraga pada akhir Oktober 2012.

Konflik ini sebenarnya merupakan akumulasi dari ketegangan laten yang sudah lama terjadi, termasuk masalah kecemburuan sosial, kesenjangan ekonomi, serta kurangnya interaksi antara warga asli Lampung dan warga transmigran Bali. Bentrokan yang terjadi pada 27-29 Oktober 2012 mengakibatkan korban tewas, serta ratusan rumah dan kendaraan rusak, khususnya di wilayah Balinuraga. Akibat peristiwa tersebut, pemerintah melakukan upaya mediasi, rekonsiliasi, dan penegakan hukum melalui pelibatan tokoh adat Lampung dan tokoh masyarakat Bali untuk meredakan situasi.

Pulau Ambon di Propinsi Maluku mempunyai sejarah yang panjang tentang konflik antara masyarakat yang berbeda agama. Segala upaya dengan pendekatan budaya telah dibentuk tetapi belum menjamin kerukunan hidup beragama dapat dipertahankan. Budaya

Pela Gandong yang diyakini dapat mencegah konflik belum mampu meredam emosi, sehingga berkembang menjadi konflik terbuka (Laporan Kompasiana.com)

Lebih jauh dalam laporan tersebut dikatakan, pemicu terjadinya konflik diawali dengan cara mengadu domba antar komunitas. Strategi tersebut mampu menceraiberaikan kesatuan dan persatuan masyarakat yang tinggal di Pulau Ambon. Faktor penyebab konflik yang tidak segera diatasi oleh seluruh pihak berkembang dengan pesat dan semakin memperkeruh situasi dengan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para pemimpinnya. Kesenjangan taraf hidup sangat memicu semakin besarnya kecemburuan masyarakat yang berada didaerah pantai dengan masyarakat yang berada di daerah pegunungan/dataran tinggi.

(https://www.kompasiana.com/zainfauzimaba242687/68ecdee8c925c404b14e9d9e/membangun-persatuan-melalui-pendidikan-multikultural-pelajaran-dari-konflik-etnis-di-papua-dan-maluku#google_vignette)

Berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik dengan cara fisik dan non fisik telah dilaksanakan sehingga dalam kurun waktu 5 tahun konflik agama dapat diselesaikan melalui komitmen kedua belah pihak dengan dilaksanakan perjanjian Malino II. Tahapan dalam rangka penyelesaian konflik sangat membantu dalam pengambilan langkah tegas dan cara mensikapi oleh berbagai pihak yang diawali dengan pemberlakuan keadaan darurat sipil dan setelah dinilai tepat waktu diberlakukan keadaan tertib sipil.

Keterlibatan semua pihak dari birokrasi, TNI, Polri, institusi yang mempunyai pendapat politik, LSM, para tokoh sangat membantu percepatan penyelesaian konflik. Pendekatan sosial budaya yang terintegrasi dengan faktor lain merupakan salah satu faktor penentu yang digunakan untuk merumuskan resolusi konflik agama di Pulau Ambon. Keterlibatan semua elemen, mengutamakan kepentingan bersama dan komitmen kedua belah pihak serta dengan difungsikannya kembali sistem dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara konsekuen pada akhirnya dapat mempercepat penyelesaian konflik agama di Pulau Ambon.

(https://www.kompasiana.com/zainfauzimaba242687/68ecdee8c925c404b14e9d9e/membangun-persatuan-melalui-pendidikan-multikultural-pelajaran-dari-konflik-etnis-di-papua-dan-maluku#google_vignette)

Di tengah kekayaan keberagaman Indonesia, konflik etnis di Papua (2025) seperti yang dilaporkan oleh Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), menjadi sinyal

peringatan bagi sistem pendidikan. Konflik ini melibatkan bentrokan antar-suku yang mengganggu kehidupan masyarakat asli, dengan intensitas tinggi yang memengaruhi akses pendidikan di wilayah tersebut. Mirip dengan konflik di Maluku yang berlangsung 25 tahun setelah kerusuhan, isu ini menyoroti kegagalan pendidikan dalam membangun nasionalisme multikultural. Saya percaya, pendidikan multikultural di sekolah harus menjadi respons utama terhadap konflik etnis, dengan mengintegrasikan adat dalam pembelajaran kewarganegaraan, karena tanpa itu, keberagaman kita berpotensi menjadi sumber perpecahan daripada persatuan.

Papua dan Maluku mencerminkan stratifikasi sosial yang dalam di masyarakat multietnis Indonesia. Di Papua, dengan lebih dari ratusan suku bangsa, pendidikan formal sering memperkuat dominasi kelompok mayoritas, di mana nilai-nilai nasional sentralistik menekan identitas etnis lokal. Ini menyebabkan ketidaksetaraan akses: siswa dari suku minoritas jarang melihat representasi budaya mereka dalam kurikulum sekolah, yang menghambat mobilitas sosial dan memperburuk polarisasi. Bayangkan anak-anak di sekolah pedalaman Papua yang belajar sejarah nasional tanpa konteks konflik suku; ini bukan pendidikan, tetapi alat untuk mempertahankan status quo.

Lebih jauh Fauzi mengatakan, interaksi sosial antar-etnis sering kali memicu kekerasan, seperti bentrokan antar-suku yang diungkapkan dalam laporan YKKMP. Di Maluku, refleksi 25 tahun konflik menunjukkan bagaimana keragaman yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kemiskinan dan kekerasan. Kurikulum sekolah yang lemah dalam pendidikan multikultural tidak mampu membekali siswa dengan keterampilan resolusi konflik, sehingga stereotip etnis tetap ada. Ketimpangan ekonomi di wilayah timur Indonesia memperburuk situasi ini: sekolah-sekolah di daerah konflik sering kali kekurangan fasilitas, yang membuat integrasi nilai toleransi terabaikan dan memperburuk siklus marginalisasi.

Dinamika kekuasaan lokal, seperti pengaruh pemimpin suku, sering kali menghambat reformasi kurikulum, karena ada resistensi terhadap pendekatan yang dianggap "mengganggu" adat. Saya percaya, tanpa analisis sosiologis dalam pendidikan sekolah, konflik etnis akan terus menjadi ancaman bagi stabilitas nasional. Konflik etnis di Papua menunjukkan kurangnya pemahaman antropologis terhadap ritual dan nilai suku lain, yang memicu kekerasan. Antropologi merekomendasikan pendekatan etnografi di sekolah, seperti studi kasus adat lokal, untuk membangun empati antar-siswa. Sayangnya, globalisasi mempercepat hegemoni budaya Jawa-sentris, sementara bahasa daerah di Papua dan Maluku semakin hilang dari pembelajaran. Ini bukan hanya kehilangan warisan, tetapi juga ancaman terhadap identitas nasional.

Tantangan utama yang dihadapi adalah infrastruktur yang buruk, akses internet yang terbatas, dan anggaran yang minim yang menghalangi pengembangan materi berbasis adat. Selain itu, ada juga resistensi dari komunitas: stereotip etnis dan konflik yang berkepanjangan membuat orang tua atau pemimpin suku menolak perubahan, seperti yang terjadi di Maluku di mana toleransi beragama masih lemah. Terakhir, kebijakan sentralistik dari pemerintah pusat yang kurang fleksibel, sering kali mengabaikan konteks etnis lokal seperti di Papua. Semua tantangan ini membuat pendidikan multikultural sering kali hanya menjadi teori, bukan praktik sehari-hari di sekolah. (Fauzi dalam Kompasiana.com diakses 20 April 2026).

Berdasarkan tinjauan pustaka, kajian terhadap konflik antaretnis diatas, lebih menyoroti dari sisi resolusi konflik seperti yang dilakukan, Fauzi, Fitrah dan Utami. Mereka ini dari akademisi yang sangat prihatin dengan kondisi konflik karena mengakibatkan korban harta dan nyawa. Dalam artikel ini, konflik antaretnis tersebut akan dijadikan sumber belajar untuk menggagas pendidikan multikultur.

2.2 Pembelajaran Berbasis Kasus

Uraian di atas adalah wacana konflik dari berbagai daerah di Indonesia. Kejadiannya sudah lama dan kondisi sekarang di daerah tersebut aman terkendali. Sebagai sebuah materi ajar Pendidikan multikultural berbasis kasus, konflik tersebut agar disesuaikan dengan kematangan berpikir siswa (psikologi). Lebih relevan materi ini diberikan ditingkat SMA atau perguruan tinggi. Penggunaan CBL memerlukan beberapa sintak.

Langkah 1 Memberikan kasus (konflik etnis Sampit, Lampung, Ambon, Papua)

Langkah 2 Menganalisis kasus-kasus tersebut, mengapa dan bagaimana konflik itu bisa terjadi

Langkah 3 Penelusuran Data, Informasi, Literatur secara mandiri dengan mencari sumber-sumber terkait

Langkah 4 Menentukan Langkah Penyelesaian Kasus dalam bentuk solusi

Langkah 5 Merumuskan Kesimpulan

Langkah 6 Presentasi Kelompok

Langkah 7 Perbaikan-perbaikan yang kurang relevan

Beberapa jenis pertanyaan yang dapat dibuat guru dalam menuntun Peserta Didik mempelajari kasus, sebagai berikut

1. Bagaimana tanggapan siswa terhadap kasus antaretnis tersebut.
2. Apa yang sesungguhnya siswa ketahui dari bacaan kasus (untuk membedakan antara fakta dan asumsi)
3. Isu-isu atau kasus-kasus apa saja yang ada? (kesempatan untuk menghubungkan dengan teori dalam bacaan)
4. Informasi apa yang masih anda perlukan? Dimana atau bagaimana anda mendapatkannya?

5. Kasus apa yang perlu dipecahkan? (kesempatan untuk berdiskusi tentang komunikasi dengan konflik, asumsi, dan argument).
6. Pro atau kontra apa yang terjadi dalam kasus tersebut? •
7. Asumsi apa yang mendasari yang kasus itu

Untuk membuka ruang kebebasan berpendapat di kelas, siswa dapat dibagi dalam beberapa kelompok kecil (antara 4-5 siswa) Peserta didik dalam Kerja Kelompok Kecil mendiskusikan tanggapannya terhadap pertanyaan studi di kelompok belajar kecil. Peserta Didik memiliki kesempatan untuk mendiskusikan kasus dan pertanyaan satu sama lain sebelum diskusi kelas secara keseluruhan. Setiap bagian dipelajari dan didiskusikan dalam kelompok kecil dengan metode kasus terputus. Beberapa bagian tertentu akan dipelajari dengan solusi yang mungkin dibahas bersama, bagian selanjutnya dari kasus diberikan kepada Peserta

Diskusi kelompok memerlukan keterlibatan aktif peserta didik dalam aktivitas belajar. Kasus yang diberikan diperiksa dan karya nya. Pendidik membantu peserta didik untuk mengungkapkan makna yang diperoleh siswa dari bacaan kasus. Pendidik selalu memperlakukan peserta didik dan gagasan mereka dengan hormat, sehingga peserta didik merasa aman untuk menyuarakan gagasannya. Pendidik mengelola periode diskusi sedemikian rupa sehingga analisis kritis peserta didik terhadap masalah kehidupan nyata dapat dipromosikan, yaitu dengan membiarkan peserta didik membuat maknanya sendiri

Pendidik mengelola periode diskusi sedemikian rupa sehingga analisis kritis peserta didik terhadap masalah kehidupan nyata dapat dipromosikan, yaitu dengan membiarkan peserta didik membuat maknanya sendiri. Peserta didik ditemui dalam sesi diskusi kelas penuh setelah memeriksa setiap bagian dalam metode pembelajaran berbasis kasus yang terputus. Tindak Lanjut kegiatan menjembatani keingintahuan yang lebih banyak peserta didik karena diskusi kelas merangsang kebutuhan tersebut (motivasi tinggi untuk membaca dan belajar lebih banyak). Hal ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok dan kegiatan yang digunakan adalah masalah penilaian pendidik tentang kebutuhan peserta didik. Sumber belajar seperti buku teks, artikel dari koran dan majalah, tabel, grafik data, laporan penelitian, video dan informasi tertulis dan visual lainnya dapat menjadi sumber dalam kegiatan tindak lanjut

2.3 Pendidikan Multikultural

Konflik antaretnis dalam hal ini merupakan instrumen pembelajaran yang disusun dalam bentuk narasi dengan membawa situasi kehidupan nyata ke dalam kelas. Pendidik dan

peserta didik dalam kelas mengerjakan masalah kehidupan nyata ini secara kolektif. Pertanyaan studi merupakan daftar pertanyaan yang akan dipresentasikan peserta didik pada akhir setiap kasus. Pertanyaan studi tidak hanya mengingat fakta, nama, label, formula, definisi, atau lainnya, tetapi mempromosikan pemahaman, karena akan mendorong peserta didik untuk menerapkan apa yang mereka ketahui dalam menganalisis data dan mengusulkan solusinya. Dalam metode yang terputus, setiap bagian memiliki pertanyaan diskusi sendiri (https://www.youtube.com/watch?v=n_qfMs0-REs)

Beberapa kasus yang dipaparkan di atas, tampak perbedaan etnis, keyakinan, ekonomi dan budaya menjadi pemicu konflik tersebut. Bahkan kasus di Papua, seperti yang disinggung YKKP, karena keragaman yang tidak dikelola dengan baik setelah 25 tahun kejadian di Ambon Maluku. Di era Orde Baru, sangat tabu membicarakan keberagaman karena pemerintah yang berkuasa ketika itu menghendaki keseragaman. Hampir tidak terungkap ke permukaan pembicaraan masalah suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Mereka takut membicarakan masalah itu karena bisa dituduh dapat mengganggu keamanan negara. Ibarat api dalam sekam, akhirnya ketika orde reformasi dengan ciri keterbukaan informasi, muncul masalah-masalah yang dianggap tabu tadi.

Kepada peserta didik ditekankan bahwa pendidikan multiultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan. Walaupun ada perbedaan adat, budaya agama, bahasa, tetapi dibalik perbedaan itu pasti ada persamaan. Bukan perbedaan yang ditonjolkan, tetapi persamaan yang dikedepankan. Dalam konflik antaretnis tadi, masyarakat pasti menginginkan kedamaian dan kesejahteraan. Semua warga yang berkonflik menginginkan hal yang sama hidup rukun dan harmonis. Keharmonisan dalam wadah satu bangsa dan negara di bawah bingkai negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak lagi mengkotak-kotakan asal usul identitas. Masalah kecil dibesar-besarkan seperti rumor yang terjadi di daerah konflik.

Warga masyarakat terutama para siswa perlu diberikan pemahaman tentang lintas budaya dan lintas agama. Dalam kurikulum, hal ini sudah dibahas dalam profil pelajar Pancasila tentang kebhinekaan global. Siswa perlu dilibatkan secara nyata dalam kegiatan sekolah yang terkait perbedaan budaya dan agama. Beberapa hal yang perlu dilaksanakan sekolah untuk menciptakan sekolah damai, sebagai berikut.

1. Libatkan para siswa dalam berbagai kegiatan keagamaan. Keterlibatan ini bukan menyangkut hal yang substansi. Bagi siswa agama lain sifatnya membantu memperlancar kegiatan.

2. Adakan perayaan khusus dengan menampilkan kesenian dari berbagai daerah, peragaan busana daerah dan cerita daerah.
3. Diskusi bersama untuk memahami dan mengerti secara jujur kultur masing-masing etnis. Minimnya pemahaman tersebut mengakibatkan prasangka negatif pada kelompok lain.
4. Warga sekolah agar menciptakan suasana sekolah yang berbhineka dan sekolah damai yang penuh toleransi.

3. Penutup

Gagasan pendidikan multikultural ini, masih bersifat konsep. Penerapannya dapat dilakukan secara akademik dan nonakademik seperti telah disinggung di atas. Secara akademik, siswa melakukan pembelajaran di kelas melalui model CBL (*case based learning*). Model CBL yang ditawarkan dengan menggunakan bahan ajar wacana konflik antaretnis (kasus Sampit, Lampung, Maluku dan Papua). CBL ini cukup relevan karena kasus yang terjadi di daerah tersebut bernuansa etnis, agama, dan golongan. Secara nonakademik, pendidikan multikultural dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti pentas seni daerah, peragaan busana daerah dan menciptakan suasana sekolah damai serta harmoni. Gagasan ini tidak tertuju pada nilai pengetahuan siswa, tetapi lebih ditekankan pada sikap karakter siswa untuk saling menghormati, menghargai dan toleransi antarsesama.

Daftar Pustaka

- Astawa, I.B.M., Teguh, I.M. 2025. *Case Based Learning*. Materi Pelatihan Pekerti Undiksha Singaraja.
- Bustoni. I.A. 2025. "Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa Pembelajaran Berbasis Kasus," Materi Webinar, Universitas Gajah Mada. Diakses 20 April 2026 (https://www.youtube.com/watch?v=n_qfMs0-REs)
- Fauzi, Z. 2025. "Membangun Persatuan Melalui Pendidikan Multikultural : Pelajaran dari Konflik Etnis di Papua dan Maluku," dalam Kompasiana.com
- Fitrah, K.E. Putri, G.A., Faadihilah. KG. "Kemanusiaan dalam Perspektif Sila ke 3: Analisis Teori Konflik Sosial pada Perang Sampit." Nusantara: Jurnal

Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora (2025) 2:2, 1-15. Diterbitkan oleh FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)

Harjana, A. 2003. "Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Budaya." Makalah pada Seminar Pendidikan Multikultural dan Hukum Adat dalam Perspektif Budaya. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Depdiknas Bogor, 18-20 Desember 2003.

https://www.kompasiana.com/zainfauzimaba242687/68ecdee8c925c404b14e9d9e/mbangun-persatuan-melalui-pendidikan-multikultural-pelajaran-dari-konflik-etnis-di-papua-dan-maluku#google_vignette

Padmadewi, N.N. 2025. *Project Based Learning* di Perguruan Tinggi. Materi Pelatihan Pekerti Undiksha, Singaraja.

Putra, I.N.P 2008. *Bali dalam Kuasa Politik*. Denpasar : Arti Foundation.

Suaka, I.N. 2022. Karya Sastra Novel sebagai Bahan Ajar Pembelajaran Berwawasan Multikultural. Dalam Seminar Sandibasa 1. UPMI Denpasar.

Suharta, G.M. 2026. Pembelajaran Berbasis Kasus (Case Based Learning). Materi Diklat Pekerta LPM Undiksha Singaraja.

Suryani, D. Konflik dan Resolusi Konflik Perbandingan di Sambas dan Sampit .

Utami, A. tth. "Resolusi Konflik Antar Etnis Kabupaten Lampung Selatan (Studi Kasus: Konflik Suku Bali Desa Balinuraga dan suku Lampung Desa Agom Kabupaten Lampung Selatan)." Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org> Konflik Sampit atau Konflik Sambas.